

# Upaya Diplomasi Ekonomi Indonesia di Afrika Melalui *Preferential Trade Agreement* Indonesia Mozambik

Langgeng Larasati<sup>1\*</sup>, Dike Aseilla<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta–Indonesia

\* corresponding author: [larasatilanggeng@gmail.com](mailto:larasatilanggeng@gmail.com)

**Abstract**—*In recent years, Indonesia has begun to expand trade cooperation in non-traditional markets, one of which is in the African region. Indonesia is active in cooperating with Africa because Africa is the "continent of hope" which contains a lot of material values that can be used wisely to increase the progress and prosperity of both parties. Indonesia has held two large meetings between Indonesia and Africa at the IAF (Indonesia Africa Forum) in 2018 followed by the IAID (Indonesia Africa Infrastructure Dialogue) on 20-21 August 2019. Mozambique is one of the countries on the African continent that is collaborating with Indonesia through the Indonesia-Mozambique Preferential Trade Agreement (IM-PTA) which was signed on 27 August 2019. This study attempts to describe the process of Indonesia's economic diplomacy in the IM-PTA. This research uses qualitative methods and literature study. The result of this research is that Indonesia's economic diplomacy efforts in IM-PTA have been carried out through seven stages of economic diplomacy. IM-PTA has now entered the ratification process and is expected to be the opening route for Indonesia's investment in Africa to increase economic growth in both countries.*

**Keywords:** *economic diplomacy, IM-PTA, indonesia, mozambique*

**Abstrak**—Beberapa tahun belakangan, Indonesia mulai memperluas kerja sama perdagangan di pasar non-tradisional yang salah satunya berada di kawasan Afrika. Indonesia giat menjalin kerjasama dengan Afrika disebabkan bahwa Afrika sebagai "Benua Harapan" yang mana banyak terkandung nilai material yang dapat dimanfaatkan dengan bijak guna meningkatkan kemajuan dan kemakmuran kedua belah pihak. Indonesia telah menggelar dua pertemuan besar Antara Indonesia dan Afrika dalam IAF (*Indonesia Africa Forum*) pada 2018 kemudian disusul dengan IAID (*Indonesia Africa Infrastructure Dialogue*) pada 20-21 Agustus 2019. Mozambik merupakan salah satu negara di benua Afrika yang menjalin kerja sama dengan Indonesia melalui *Preferential Trade Agreement* Indonesia-Mozambik (IM-PTA) yang ditandatangani pada 27 Agustus 2019. Penelitian ini berupaya untuk menguraikan proses diplomasi ekonomi Indonesia dalam IM-PTA. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah upaya diplomasi ekonomi Indonesia dalam IM-PTA telah dijalankan melalui tujuh tahapan diplomasi ekonomi. IM-PTA kini sudah memasuki proses ratifikasi dan diharapkan dapat menjadi pembuka jalur investasi Indonesia di Afrika untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kedua negara.

**Kata kunci:** *diplomasi ekonomi, IM-PTA, indonesia, mozambik*

## PENDAHULUAN

Liberalisme perdagangan menjadi peluang bagi banyak pihak termasuk aktor negara untuk saling melakukan transaksi jual beli produk atau jasa secara masif dan mudah ke seluruh dunia. Perundingan dalam bidang ekonomi dan perdagangan membuat daya tarik kedekatan antar negara yang kemudian menjadi pendorong yang kuat dalam terbentuknya perjanjian bebas (Lamy, 2012). Untuk ikut serta dalam berbagai perjanjian dagang internasional, setiap negara melakukan diplomasi ekonomi yang umumnya dipahami sebagai upaya yang dilakukan negara untuk membangun relasi negara lain dalam bidang ekonomi dengan cara melakukan negosiasi dengan negara mitra untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil mulai mengembangkan sayapnya dalam perjanjian perdagangan di beberapa kawasan seperti Eropa, Asia, dan Australia. Ditambah lagi, kini Indonesia mulai meluaskan pasarnya di Benua Afrika dengan cara melakukan berbagai perjanjian bilateral maupun regional. Afrika dijadikan sebagai mitra dalam melakukan perdagangan dikarenakan memiliki potensi yang dianggap cukup menguntungkan bagi kedua pihak untuk menunjang pertumbuhan di masing-masing negara.

Langkah awal kerjasama Indonesia-Afrika berlangsung pada 10-11 April 2018 dengan diadakannya IAF (*Indonesia Africa Forum*) di Nusa Dua, Bali yang dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh representatif negara-negara Afrika. Kemudian kegiatan tersebut ditindaklanjuti dengan adanya IAID (*Indonesia Africa Infrastructure Forum*) pada 20- 21 Agustus 2019 yang

dihadiri oleh 53 perwakilan dari Afrika, 700 pengusaha, dan beberapa pemangku kepentingan dalam kerjasama Indonesia–Afrika. Melalui pertemuan Indonesia Afrika tersebut, Indonesia pertama kali menyetujui perjanjian dagang *preferential trade agreement* dengan salah satu negara Afrika yaitu Mozambik.

Perjanjian *Preferential Trade Agreement* (PTA) Indonesia-Mozambik (yang selanjutnya disingkat IM-PTA) pertama kali diinisiasi sejak tahun 2017 berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, kepada Presiden Mozambik Filipe Nyusi dalam kunjungan misi Pemerintah Indonesia (Pemri) bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) ke Maputo. Selanjutnya, Presiden Mozambik menyampaikan kesediaan negaranya untuk memulai negosiasi kepada Presiden Joko Widodo di sela-sela pertemuan IORA (*Indian Ocean Rim Association*) pada Maret 2017 di Jakarta. IM-PTA ditandatangani oleh Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Mozambik Ragendra Berta de Sousa di Maputo, Mozambik, pada 27 Agustus 2019. Penandatanganan dilaksanakan bersamaan dengan pameran dagang terbesar di Mozambik yaitu *the 55th International Trade Fair–FACIM 2019*. Pada kerja sama IM-PTA, Indonesia memberikan penurunan tarif pada 242 pos tarif kepada Mozambik, sedangkan Mozambik memberikan penurunan tarif sekitar 217 pos tarif kepada Indonesia dalam beberapa sektor barang impor yang masuk ke negara masing-masing.

Strategi optimalisasi perlu dibangun oleh Pemri dalam diplomasi ekonominya yang salah satunya adalah dengan melakukan konsolidasi aktor diplomasi ekonomi. Terlihat bahwa pemerintah berpaku pada aktor negara dan belum memanfaatkan aktor non-negara secara optimal (Elisabeth, 2016). Bayne dan Woodlock (2017) menguraikan lima kelompok pemain utama diplomasi ekonomi dalam suatu negara yaitu pemerintah pusat, kementerian, anggota legislatif, pengatur otonom, serta firma komersial, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor privat lainnya. Proses pembuatan keputusan yang dilakukan negara dalam diplomasi ekonomi dibagi menjadi tujuh tahapan. Pertama, menentukan pemimpin yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan kementerian untuk mengidentifikasi departemen yang akan memimpin dalam diplomasi ekonomi yang dituju. Kedua, konsultasi eksternal yang dilakukan oleh departemen pemimpin dan para pemain sektor privat (aktor di luar pemerintahan). Departemen biasanya berkonsultasi dengan para pemegang kepentingan bisnis, LSM, dan juga para akademisi. Ketiga, koordinasi internal. Tahapan ini dilakukan untuk mendapatkan pandangan yang sama antara semua pihak dalam level pemerintah pusat.

Keempat, keputusan politik. Pada tahap ini mulai muncul proses politik yang melibatkan banyak menteri. Para pejabat pemerintahan menyerahkan pekerjaan mereka ke menteri-menteri dengan cara memberikan otoritas politik. Kelima, legitimasi demokratis. Di pemerintahan yang non-demokratis, keputusan oleh para menteri maupun kepala pemerintahan dapat menyelesaikan masalah. Berbeda dengan halnya di negara demokratis yang membutuhkan proses lebih jauh untuk memberikan legitimasi kepada persetujuan pemerintah dan untuk memenuhi akuntabilitas para pemilihnya. Keenam, negosiasi internasional. Setelah melewati tahap satu hingga lima, pemerintah sudah siap untuk bernegosiasi dengan negara mitra. Dalam proses internasional ini, tahapan yang ada di tingkat domestik juga masih terus dilakukan. Ketujuh, ratifikasi perjanjian. Ketika hasil negosiasi telah tercapai, tahap terakhir dalam urutan domestik adalah ratifikasi perjanjian sebagai komitmen pemerintah. Tak hanya itu, pemerintah juga melakukan kampanye media untuk memastikan bahwa perjanjian diterima oleh publik.

Dalam menjalankan diplomasi ekonominya, Indonesia perlu melakukan tahap-tahap tersebut agar bisa merumuskan kepentingan dari semua aktor yang kemudian diperjuangkan dalam tahap negosiasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tujuh tahapan diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Mozambik dalam IM-PTA. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan lebih detail tentang upaya Pemerintah Indonesia dalam menjalankan diplomasi ekonomi serta dapat dijadikan informasi bagi pihak terkait maupun peneliti selanjutnya mengenai upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu penelitian yang mementingkan kualitas data yang dikumpulkan sebagai pendukung argumentasi (Sunarto, 2004). Selain mengandalkan segi kualitas data yang dikumpulkan, penelitian kualitatif juga akan melakukan penelitian lanjutan terhadap catatan penelitian yang tersedia di lapangan. Analisis data kualitatif dilakukan secara kontinuitas atau berkelanjutan di mana ketika seorang peneliti memulai sebuah penelitian di lapangan maka besar kemungkinan arah penelitian akan mengikuti kondisi di lapangan. Metode kualitatif merupakan salah satu alur yang dilakukan dalam sebuah penelitian guna mendapatkan hasil berbentuk kata ataupun argumentasi tertulis dari sebuah objek penelitian atau tindakan sebuah kebijakan. Analisis yang dilakukan dalam data kualitatif akan menjabarkan data non statistik ataupun angka dan mengutamakan penalaran yang berdasarkan pada teori yang berkaitan dengan topik penelitian

## HASIL

### **Ekonomi dan Perdagangan Indonesia - Mozambik**

Menurut Bank Dunia dan PBB, Indonesia dan Mozambik sama-sama merupakan negara berkembang. Indonesia membuka perjanjian dagang dengan Mozambik dengan harapan akan memperbaiki perekonomian masing-masing negara. GDP (*Gross Domestic Products/Produk Domestik Bruto*) yang dimiliki Indonesia pada 2020 mencapai 3,869.6 US\$ sedangkan GDP yang dimiliki oleh Mozambik hanya sebesar 448,6 US\$. Meskipun terjadi ketimpangan dalam hal perekonomian, Indonesia tetap memilih kerja sama dengan Mozambik yang berlandaskan beberapa alasan termasuk tentang populasi serta geografis Mozambik yang strategis sebagai gerbang masuk produk Indonesia ke beberapa wilayah negara di Afrika. Begitu pun dengan Mozambik yang menilai pasar Indonesia sebagai pasar yang menarik.

**Tabel 1**

*Deskripsi Indikator Makroekonomi Indonesia-Mozambik Tahun 2020*

DESKRIPSI	INDONESIA	MOZAMBIK
GDP, current prices (US\$)	1,058,423.84	14,021.42
GDP per capita (US\$)	3,869.6	448.6
Inflation (%)	1.9	2.8
Unemployment rate (%)	4.3	3.4
Population(millions)	273,523,621	31,255,435

*Sumber: IMF World Bank*

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja Indonesia dalam bidang makroekonomi dapat dikategorikan lebih baik dibandingkan Mozambik. Inflasi yang terjadi di Indonesia menunjukkan angka yang lebih rendah daripada Mozambik. Pendapatan perkapita Mozambik masih berkisar di angka 448.6 US\$ yang berarti 6 kali lebih rendah daripada pendapatan perkapita Indonesia yang sudah mencapai 3.869.6 US\$. kedua negara memegang peranan penting dalam hal perdagangan, terlihat dari neraca perdagangan berikut yang menunjukkan angka daya beli dan ekspor yang cukup tinggi dalam beberapa kategori komoditi tertentu khususnya dalam komoditi jenis non migas. Berikut ini adalah tabel neraca perdagangan Indonesia-Mozambik periode 2017 – 2021.

**Tabel 2**

*Neraca Perdagangan Indonesia – Mozambik Periode 2017 – 2021*

<b>Neraca Perdagangan INDONESIA dengan MOZAMBIK Periode 2017 - 2021</b>					
<b>URAIAN</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>TOTAL PERDAGANGAN</b>	<b>82,151.2</b>	<b>91,877.1</b>	<b>149,328.4</b>	<b>69,269.2</b>	<b>31,259.9</b>
MIGAS	0	0	0	14,1	0
NON MIGAS	82,151.2	91,877.1	149,328.4	69,255.1	31,259.9
<b>EKSPOR</b>	<b>54,081.1</b>	<b>61,375.7</b>	<b>129,715.7</b>	<b>58,927.6</b>	<b>27,979.7</b>
MIGAS	0	0	0	14,1	0
NON MIGAS	54,081.1	61,375.7	129,715.7	58,913.5	27,979.7
<b>IMPOR</b>	<b>28,070.1</b>	<b>30,501.4</b>	<b>19,612.7</b>	<b>10,341.6</b>	<b>3,280.2</b>
MIGAS	0	0	0	0	0
NON MIGAS	28,070.1	30,501.4	19,612.7	10,341.6	3,280.2
<b>NERACA</b>					
<b>PERDAGANGAN</b>	<b>26,011.1</b>	<b>30,874.3</b>	<b>110,103.0</b>	<b>48,586.0</b>	<b>24,699.5</b>
MIGAS	0	0	0	14,1	0
NON MIGAS	26,011.1	30,874.3	110,103.0	48,571.9	24,699.5

Sumber : Kementerian Perdagangan RI

Berdasarkan neraca perdagangan tersebut, Indonesia melakukan kerja sama perdagangan dengan Mozambik hanya dalam komoditi non-migas dan pada periode 2017-2021. Besarnya ekspor yang dilakukan oleh Indonesia ke Mozambik menjelaskan bahwa Indonesia merupakan pemasok penting dalam ekspor non migas bagi Mozambik. Melihat neraca perdagangan tersebut maka seharusnya Mozambik masuk ke dalam kategori mitra dagang yang menjanjikan bagi Indonesia sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak serta mendapatkan surplus neraca perdagangan yang diinginkan. Beberapa komoditi terbesar yang diekspor Indonesia ke Mozambik di antaranya adalah minyak kelapa sawit, sabun, margarin, dan kertas. Sedangkan komoditi terbesar yang diimpor Indonesia dari mozambik di antaranya adalah kacang tanah, tembakau tidak diolah, kapas, bijih mangan, besi paduan, dan kacang polong kering.

## **BAHASAN**

### **Proses Diplomasi Ekonomi Indonesia pada Perjanjian IM-PTA**

Dalam menjalankan diplomasi ekonomi, diperlukan tahapan-tahapan secara domestik agar dapat mengakumulasikan seluruh kepentingan-kepentingan yang ada di lingkup domestik sebelum dibawa ke meja perundingan. Tujuh tahapan perlu dilakukan Indonesia untuk memaksimalkan tercapainya kepentingan nasional dalam perundingan IM-PTA yang di antaranya adalah *taking the lead* (menentukan pemimpin), *external consultation* (konsultasi eksternal), *internal coordination* (koordinasi internal), *political decision* (keputusan politik), *political legitimation* (legitimasi politik), *international negotiation* (negosiasi internasional), serta *ratification of agreement* (ratifikasi perjanjian) (Bayne & Woolcock, 2017).

### ***Taking the lead***

Dalam bidang perdagangan, Pemri menggolongkan kawasan mitra dagang Indonesia menjadi dua, yaitu pasar tradisional dan non-tradisional. Mozambik merupakan negara mitra yang tergolong dalam pasar non-tradisional yaitu negara yang secara ekonomi berpotensi untuk perkembangan ekspor bagi Indonesia. Perluasan pasar non-tradisional membuat Indonesia gencar melakukan diplomasi ekonomi yang salah satunya dilakukan kepada Mozambik. Berdasarkan instruksi Presiden Joko Widodo tentang perluasan pasar non-tradisional, dipilihlah Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI sebagai *lead departement* dan

dibantu oleh Direktorat Perundingan Bilateral Kemendag (Dit. Bilateral) sebagai tim negosiator sekaligus koordinator Indonesia dalam IM-PTA.

Setidaknya di negara-negara maju, posisi leader dalam diplomasi ekonomi umumnya diberikan pada departemen yang bertanggung jawab dalam area kebijakan tersebut seperti kementerian perdagangan, kementerian lingkungan, dan lainnya (Bayne & Woolcock, 2017). Di Indonesia sendiri umumnya Kemendag RI yang mengurus perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan FTA, CEPA, maupun FTA. Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, diplomasi ekonomi banyak dilakukan oleh kementerian teknis terkait seperti Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan lain sebagainya (Elisabeth, 2016).

### **External consultation**

Setelah menentukan tim negosiator, langkah selanjutnya adalah melakukan koordinasi eksternal yang berada di luar lingkup pemerintahan. Biasanya tim negosiator berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan bisnis untuk mendapatkan pandangan dari pihak yang terjun langsung dalam praktik perdagangan serta menguji coba bagaimana pasar melihat kebijakan yang diambil departemen tersebut. Para pemangku bisnis biasanya sudah terorganisir dengan baik melalui konfederasi industri di negara tersebut, asosiasi sektoral, maupun perusahaan individu. Kepentingan dalam pelaku bisnis pun bisa berbeda-beda tergantung bagaimana kebijakan itu dapat mempengaruhi industri bisnisnya. Selain itu, tim negosiator juga melakukan konsultasi dengan LSM, akademisi, dan lembaga *think-tank* untuk merumuskan kebijakan yang akan dibawa pada perundingan nanti (Bayne & Woolcock, 2017).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Dit. Bilateral dan Suara Indonesia, Direktur Perundingan Bilateral Ni Made Ayu Marthini menjelaskan bahwa dalam perundingan IM-PTA dilakukan sejumlah kolaborasi dengan para asosiasi perusahaan seperti KADIN dan APINDO (Bilateral, 2019). Tim negosiator menginformasikan kepada mereka mengenai hal-hal apa saja yang dibawa dalam perundingan ini dan juga para pelaku usaha memberikan masukan kepada tim negosiator saat ataupun sebelum negosiasi berlangsung. Melalui unggahan pada laman Instagram @ditbilateral, KADIN Indonesia menyelenggarakan acara Public Private Dialogue: International Trade and Investment dan menggandeng beberapa instansi terkait seperti Ditjen PPI, BKPM, Kemlu, dan perwakilan mitra dagang. Berkumpulnya para aktor pemerintahan dan publik menjadi kunci penting untuk menyamakan kepentingan yang selanjutnya akan dibawa ke meja perundingan (Dit. Bilateral, 2017).

### **Internal coordination**

Tujuan dari adanya koordinasi internal ialah untuk mendapatkan pandangan persetujuan di tingkat pemerintahan. Tim negosiator harus menentukan strateginya tersendiri dan menyelesaikan segala perbedaan di tingkat internal. Dalam tahapan ini biasanya hasil dari konsultasi eksternal akan dibawa dan didiskusikan dengan pejabat pemerintahan lainnya. Dalam negosiasi yang kompleks seperti perundingan multilateral memungkinkan semakin banyak departemen/kementerian yang terlibat dalam tahapan ini.

Dari wawancara yang dilakukan Suara Indonesia bersama Direktur Dit. Bilateral Kemendag Ni Made Ayu Marthini, tim negosiator melakukan koordinasi dengan kementerian teknis lainnya seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perindustrian, dan lainnya. Hal tersebut dilaksanakan karena adanya perbedaan kepentingan dari kementerian terkait dan diusahakan untuk diselesaikan dalam tahap koordinasi internal ini (Bilateral, 2019). Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Indonesia Kemendag RI kerap menghadiri Diskusi Panel Diplomasi Ekonomi Rapat Kerja Kepala Perwakilan RI di Kementerian Luar Negeri dan membahas tentang perjanjian kerja sama perdagangan Indonesia dengan negara-negara pasar non-tradisional (Dit. Bilateral, 2018). Melalui wawancara tersebut, Dit. Bilateral juga menyampaikan telah berkoordinasi dengan KBRI Mozambik, Kedutaan Besar Mozambik di Indonesia, bahkan dengan Direktorat Jenderal Pembangunan Ekspor Nasional Kemendag agar dapat membantu mempromosikan produk-produk Indonesia dalam IM-PTA ini.

### **Political decision**

Memasuki tahapan ini maka rancangan kebijakan diplomasi ekonomi akan terbentuk dari adanya koordinasi yang dilakukan antar-instansi maupun kementerian yang bersangkutan. Rancangan ini kemudian diserahkan kepada pemerintah pusat untuk dikritisi, baik dengan memberikan saran ataupun mengoreksi draft yang telah disusun. Dalam tahapan ini dapat dilihat bahwa pemerintah pusat mencanangkan kebijakan bagi Indonesia untuk membuka diri kepada pasar non-tradisional yang salah satunya adalah Mozambik. Adanya kebijakan ini memudahkan instansi yang bertanggung jawab dalam diplomasi ekonomi Indonesia untuk menjalankan negosiasi IM-PTA.

### **Democratic legitimation**

Dalam negara demokrasi diperlukan satu langkah yang lebih panjang untuk mendapatkan legitimasi dari pemerintah pusat salah satunya adalah melakukan pemungutan suara oleh lembaga legislatif (Bayne & Woolcock, 2017). Dalam pemutusan IM-PTA, DPR-RI mengadakan sidang rapat terbuka bersama Menteri Perdagangan Indonesia membahas IM-PTA tersebut. Sidang yang dilaksanakan pada Desember 2020 menyetujui penandatanganan dan ratifikasi IM-PTA hal ini bisa terlihat dari jumlah pemungutan suara oleh DPR-RI yang mana suara yang menyetujui perjanjian tersebut oleh beberapa fraksi yang terlibat mendapat suara lebih banyak.

### **International negotiation**

Setelah melalui lima tahap, pemerintah bersiap untuk melakukan negosiasi internasional. Pasca proses perumusan kebijakan dalam internal dan telah mendapat persetujuan dari para pejabat pemerintahan lainnya, tim negosiator melanjutkan diplomasi ekonomi IM-PTA ke ranah negosiasi. Proses negosiasi ini didokumentasikan melalui laman Instagram @ditbilateral dengan baik sehingga memberi informasi pada masyarakat tentang progres yang terdapat pada perundingan IM-PTA. Pada 11 April 2018, menteri perdagangan kedua negara melakukan joint statement di sela-sela IAF di Bali. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas rencana kerja sama IM-PTA agar dapat dimulai secepatnya di meja perundingan. Pada 31 Maret sampai 1 Juni 2018, perundingan pertama IM-PTA berlangsung di Kantor Kementerian Industri dan Perdagangan Mozambik di Maputo. Pada perundingan ini, Delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Perundingan Bilateral Kemendag, Ni Made Ayu Marthini, dan Direktur Hukum dan Perjanjian Ekonomi Kemlu, Amrih Jinangkung. Perundingan pertama ini berfokus pada pembahasan dan finalisasi draft text (Dit. Bilateral, 2018).

Dalam proses ini, level domestik memungkinkan untuk tetap melakukan pembaharuan kelima tahap awal untuk mencapai hasil kesepakatan yang menguntungkan negaranya. Hal tersebut dapat dilihat dari kunjungan Dubes RI untuk Maputo, Tito Dos Santos, ke kantor Dit. Perundingan Bilateral di sela-sela persiapan perundingan putaran kedua IM-PTA (Dit. Bilateral, 2018). Dapat dipahami bahwa koordinasi antar instansi pemerintahan sangat diperlukan dalam tahapan ini mengingat proses negosiasi internasional bersifat dinamis dan kebijakan yang diambil dapat berubah sewaktu-waktu.

Perundingan kedua berlangsung pada 6 November 2018 di Maputo. Perundingan ini berlangsung pada 6-9 November 2018. Hasil putaran kedua perundingan ini antara lain adalah kedua pihak berhasil menyepakati *draft text* IM-PTA, menyelesaikan proses *legal scrubbing*, dan pembahasan *draft text Rules of Origin (RoO)* yang telah rampung 80%. Hal-hal yang belum diselesaikan akan ditindaklanjuti secara intersesi. Selain itu, Dit. Bilateral juga memberikan penyebaran perluasan informasi melalui kegiatan yang dilaksanakan di Medan pada 6 Desember 2018 yang ditujukan kepada pemangku kepentingan dan pelaku usaha tentang potensi ekspor ke pasar non-tradisional (Dit. Bilateral, 2018).

Perundingan ketiga berlangsung pada 4-6 Februari 2019 di Maputo dan perundingan IM-PTA telah selesai berkat komitmen dan kerja sama kedua pihak. Pada perundingan ini, kedua negara telah menyelesaikan pembahasan teks RoO dan telah menyelesaikan pembahasan akses pasar. Pada Februari-Juli 2019, kedua negara melakukan pertukaran

updated offer list dan finalisasi offer. Penandatanganan IM-PTA berlangsung pada 27 Agustus 2019 di Maputo yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan RI bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan Mozambik (Dit. Bilateral, 2019). Diharapkan kedepannya IM-PTA dapat menjadi pintu gerbang bagi kerja sama Indonesia dengan negara-negara lain di Afrika. IM-PTA akan membantu Indonesia untuk meningkatkan ekspor ke pasar non-tradisional di kawasan Afrika.

### **Ratification**

Setelah mencapai kesepakatan bersama, selanjutnya kedua negara melakukan ratifikasi di negaranya masing agar perjanjian dagang tersebut bisa diberlakukan. Untuk Indonesia sendiri, proses ratifikasi dapat dikatakan selesai apabila Peraturan Presiden atau Undang-Undang tentang Pengesahan IM-PTA dan Peraturan Menteri Keuangan tentang pelaksanaan IM-PTA telah diterbitkan. Melalui proses koordinasi yang melibatkan sejumlah kementerian dan legislatif, IM-PTA disetujui untuk disahkan melalui Peraturan Presiden pada 8 Desember 2020. Informasi terbaru dari proses ratifikasi ini adalah Dit. Bilateral Kemendag bersama tim Setditjen PPI mengadakan rapat pembahasan mengenai Rancangan Perpres serta Naskah Pertimbangan yang sangat penting untuk tahapan penyelesaian ratifikasi IM-PTA. Apabila proses ratifikasi telah selesai, kedua negara mengirimkan nota diplomatik untuk menginformasikan bahwa proses ratifikasi telah selesai dan perjanjian siap berlaku 60 hari sejak pertukaran nota diplomatik dilakukan.

### **Peluang dan Hambatan Bagi Indonesia dalam IM-PTA**

Pemilihan Mozambik sebagai mitra dagang merupakan strategi yang tepat bagi Indonesia. Mozambik merupakan negara yang tidak masuk dalam custom union apapun sehingga proses diplomasi ekonomi dengan Mozambik dapat lebih lancar dan cepat. Mozambik memiliki geografis yang strategis karena dekat dengan laut lepas memiliki garis pantai yang panjang serta adanya pelabuhan laut yang luas untuk kegiatan ekspor impor. Mozambik berbatasan dengan landlocked countries sehingga Mozambik dapat menjadi hub bagi Indonesia untuk masuk ke pasar Afrika (Dit. Bilateral, 2019).

Pada upaya diplomasi ekonomi IM-PTA, Pemerintah Indonesia mendapatkan berbagai macam peluang dan hambatan dalam kerja sama ini. Melalui wawancara yang dilakukan Dit. Bilateral Kemendag dengan Suara Indonesia, Direktur Dit. Bilateral Kemendag Ni Made Ayu Marthini menjelaskan beberapa manfaat langsung yang dapat diterima Indonesia dalam IM-PTA. Pengurangan tarif merupakan salah satu manfaat langsung dalam kerja sama ini. Umumnya, tarif di kawasan Afrika tergolong tinggi sehingga menyebabkan produk Indonesia menjadi lebih mahal. Melalui IM-PTA, beberapa produk dapat mendapat tarif sebesar 0% ataupun tarif yang lebih rendah dari sebelumnya. Produk-produk Indonesia yang terdaftar dalam IM-PTA antara lain adalah sabun, minyak goreng, kertas, produk industri olahan, olahan ikan, semen, alas kaki, tekstil, sepeda motor, dan produk kesehatan. Adanya perjanjian ini juga dapat menarik minat investor Indonesia untuk menanamkan modalnya di Mozambik, mengingat negara ini memiliki pasar yang sedang berkembang (Bilateral, 2020).

Masih dalam wawancara yang sama, Ni Made Ayu Marthini menguraikan beberapa hambatan yang Indonesia hadapi dalam kerja sama ini. IM-PTA berbentuk *preferential agreement* sehingga hanya produk-produk tertentu yang mendapatkan tarif rendah. Pada kalangan eksportir, masih banyak pemikiran tentang negara-negara Afrika yang mereka anggap ekonominya masih rendah. Padahal, kini pasar Afrika tengah berkembang dan Indonesia harus menjalin kerja sama dengan negara-negara kawasan tersebut agar tidak ketinggalan dengan negara-negara lain. Oleh karena itu, diadakan sejumlah sosialisasi bagi para pelaku usaha maupun masyarakat tentang IM-PTA ini. Misalnya seperti pengadaan Sosialisasi IM-PTA di Bandung untuk mendorong pengusaha tekstil di Bandung agar mengeksport produknya ke Mozambik (Gareta, 2021). Selain itu, diadakan juga berbagai webinar yang diselenggarakan oleh Dit. Bilateral Kemendag seperti webinar yang bertajuk “Memanfaatkan IM-PTA dan Mendorong Peningkatan Dagang ke Wilayah Sub Sahara Afrika” yang diisi oleh aktor

pemerintahan dan pelaku usaha. Terakhir, Dit. Bilateral Kemendag juga melakukan sosialisasi yang berkolaborasi dengan RRI dan kemudian diunggah melalui kanal Spotify Dit. Bilateral Kemendag agar dapat menjangkau masyarakat luas.

## SIMPULAN

IM-PTA merupakan sebuah kerangka kerja sama yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk mendongkrak pasar global non-tradisional. Diplomasi ekonomi dalam IM-PTA dipimpin oleh tim negosiator yang berasal dari Direktorat Perundingan Bilateral Kementerian Perdagangan serta dibantu oleh kementerian/lembaga lainnya serta aktor non-negara seperti para pelaku usaha. Peran negara dalam diplomasi ekonomi dapat digambarkan dalam tujuh tahapan domestik dan penelitian ini dapat menganalisis tujuh tahapan tersebut. Menjadikan Mozambik sebagai negara mitra merupakan pintu gerbang bagi Indonesia untuk masuk ke pasar Afrika. IM-PTA telah mencapai proses ratifikasi dan sedang menunggu terbitnya Peraturan Presiden sebelum perjanjian ini dapat diimplementasikan. Selagi menunggu proses ratifikasi, Direktorat Perundingan Bilateral Kemendag melakukan sosialisasi dengan berbagai platform terkait IM-PTA. Kekurangan dari penelitian ini terletak pada minimnya data yang dapat peneliti peroleh sehingga penjelasan tahapan hanya secara garis besar dan diharapkan penelitian selanjutnya dapat menganalisis secara lebih komprehensif.

## PUSTAKA ACUAN

- Bank, W., 2021. *World Bank Data Open*. [Online] Available at: <https://data.worldbank.org/> [Accessed 20 July 2021].
- Bayne, N. & Woolcock, S., 2017. *The New Economic Diplomacy*. New York: Routledge.
- Bilateral, D., 2019. *Life at DPB E01: Interview with RRI Voice of Indonesia on Indonesia-Mozambique PTA*. [Perekaman Suara] (Direktorat Perundingan Bilateral).
- Bilateral, D., 2020. *Life at DPB E02: Wawancara dengan RRI Voice of Indonesia tentang Indonesia-Mozambik PTA*. [Sound Recording] (Spotify Dit. Bilateral).
- Bogdan; dan Taylor, 2012. *Dalam Moleong, Pendekatan Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Development., U. N. C. O. T. A., 2019. [Online] Available at: [https://unctad.org/system/files/official-document/wir2017\\_en.pdf](https://unctad.org/system/files/official-document/wir2017_en.pdf) [Accessed 28 July 2021].
- Dit. Bilateral, 2017. *Kegiatan Public Private Dialogue*, Jakarta: Instagram @dit.bilateral.
- Dit. Bilateral, 2018. *Kegiatan Diskusi Panel Diplomasi Ekonomi Rapat Kerja Kepala Perwakilan RI di Kemlu*, Jakarta: Instagram @dit.bilateral.
- Dit. Bilateral, 2018. *Kegiatan Peluang dan Strategi Menembus Pasar Prospektif Ekspor*, Medan: Instagram @dit.bilateral.
- Dit. Bilateral, 2018. *Kunjungan Dubes RI Untuk Maputo*, Jakarta: Instagram @dit.bilateral.
- Dit. Bilateral, 2018. *Perundingan Pertama IM-PTA*, Maputo: Instagram @dit.bilateral.
- Dit. Bilateral, 2019. *Fact Sheet IM-PTA*, Jakarta: Direktorat Perundingan Bilateral.
- Elisabeth, A., 2016. *Road Map Kebijakan Luar Negeri Indonesia (2015-2020): Mewujudkan Diplomasi Ekonomi Inklusif, Berbasis Lingkungan Berkelanjutan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Gareta, S. P., 2021. *Wamendag: Perjanjian Dagang RI-Mozambik Datangkan Keuntungan Ganda*, Jakarta: ANTARA.
- Internasional, D. J. P. P., 2019. *"Indonesia-Mozambik PTA: Perjanjian Dagang Pertama Indonesia dengan Negara di Afrika"*. [Online] Available at: <https://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/berita/detail/indonesia->



mozambik-pta-perjanjian-dagang-pertama-indonesia-dengan-negara-di-afrika  
[Accessed 28 July 2021].

Lamy, P., 2012. *Report of the chairman of the trade negotiations committee*, s.l.: World Trade Organization .

Solution, W. I. T., 2019. [Online] Available at:  
<https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/WLD/StartYear/2011/EndYear/2017/TradeFlow/Export/Indicator/XPRT-TRD-VL/Partner/MOZ/Product/all-groups>  
[Accessed 25 July 2021].

Sunarto, K., 2004. Pengantar Sosiologi Edisi Revisi.. In: Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.